

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Semakin berkembangnya era globalisasi yang ditandai dengan banyaknya perusahaan-perusahaan yang baru muncul menyebabkan semakin ketatnya persaingan antar perusahaan untuk meningkatkan nilai dan kinerja perusahaannya. Oleh karena itu, laporan keuangan sebagai salah satu komponen yang digunakan untuk menilai kinerja perusahaan serta sebagai salah satu alat pengambilan keputusan ekonomi harus disajikan secara lengkap dan benar. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (2015: 2) laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi laporan posisi keuangan akhir periode, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Laporan laba rugi merupakan salah satu komponen laporan keuangan yang sangat penting karena terdapat informasi laba di dalamnya yang bermanfaat bagi pengguna informasi laporan keuangan. Menurut *Statement of Financial Accounting Concept* (SFAC) No. 1, informasi laba merupakan indikator untuk mengukur kinerja atas pertanggungjawaban manajemen dalam mencapai tujuan operasi yang telah ditetapkan serta membantu pemilik untuk memperkirakan *earning power* perusahaan di masa yang akan datang. Ujiyantho & Pramuka (2007) dalam Yuliani Almalita (2017) mengatakan laporan keuangan yang sering

dijadikan penilaian dasar adalah laporan laba rugi akan tetapi angka laba yang dihasilkan dalam laporan laba rugi seringkali dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan sehingga belum tentu mencerminkan kas yang benar. Oleh sebab itu informasi laba rentan menjadi objek rekayasa oleh manajemen melalui tindakan oportunistis yang mementingkan diri sendiri dengan cara memilih kebijakan akuntansi tertentu, sehingga laba dapat diatur sesuai keinginan.

Sampai saat ini masih terdapatnya perbedaan pendapat dan pemahaman mengenai manajemen laba. Secara garis besar manajemen laba merupakan upaya mengubah, menyembunyikan dan menunda informasi keuangan. Tindakan ini dilakukan oleh manajer dengan memanfaatkan kelemahan pihak yang tidak memiliki sumber dan akses yang memadai tentang perusahaan. Tindakan ini juga dilakukan manajer untuk memaksimalkan kesejahteraan pribadi.

Manajemen laba adalah tindakan manajemen untuk mengatur laba di dalam pelaporan keuangan perusahaan dengan menaikkan atau menurunkan angka laba sesuai dengan kepentingan pribadi (manajer). Umumnya perusahaan menggunakan prinsip akuntansi akrual yang memungkinkan manajemen melakukan penyesuaian arus kas agar memberikan gambaran kinerja perusahaan dan posisi keuangan yang baik. Manajemen laba tidak sepenuhnya dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang negatif selama metode akuntansi yang dipilih tidak menyimpang dari Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku karena tidak selamanya manajemen laba berorientasi pada manipulasi laba. Perilaku manajer yang mengatur laba sesuai keinginannya dengan cara memilih kebijakan akuntansi tertentu agar laba bisa dinaikkan atau diturunkan sesuai keinginannya (manajer)

dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap laporan keuangan tersebut.

Beberapa fenomena mengenai manajemen laba yang terjadi pada perusahaan besar contohnya, pada perusahaan PT Agis Tbk, PT Inovisi Infracom dan perusahaan milik Bakrie Group. Pada kasus PT Agis, perusahaan terbukti telah memberikan informasi yang secara material tidak benar terkait dengan pendapatan 2 (dua) perusahaan yang diakuisisi yaitu PT Akira Indonesia dan PT TT Indonesia. Pendapatan kedua perusahaan tersebut dinyatakan sebesar Rp 800 miliar, namun berdasarkan laporan keuangan kedua perusahaan yang akan diakuisisi per 31 Maret 2007 total pendapatannya sebesar Rp 466,8 miliar. PT Agis juga melakukan pelanggaran terkait laporan keuangan perusahaan yang merupakan konsolidasi dari salah satu anak perusahaannya, PT AGIS Elektronik. Dalam laporan laba rugi konsolidasi AGIS diungkapkan pendapatan lain-lain bersih senilai Rp 29,4 miliar yang berasal dari laporan keuangan AGIS Elektronik tidak didukung dengan bukti-bukti kompeten dan terjadi kesalahan penerapan prinsip akuntansi. Dengan demikian pendapatan lain-lain tersebut adalah tidak wajar dan mengakibatkan laporan keuangan konsolidasian AGIS juga tidak wajar.

(<http://hukumonline.com/berita/baca/hol18207/garagara-informasi-tak-benar-bapepam-denda-pt-agis/>).

Berbeda dengan kasus PT Inovisi Infracom pada tahun 2015, Bursa Efek Indonesia (BEI) menemukan adanya salah saji dalam laporan keuangan INVS oleh pihak manajemen. Pada periode semester pertama 2014 pembayaran gaji pada karyawan sebesar Rp 1,9 triliun. Namun, pada kuartal ketiga 2014 angka

pembayaran gaji kepada karyawan turun menjadi Rp 59 miliar. Sebelumnya manajemen INVS telah merevisi beberapa nilai dari laporan keuangan seperti aset tetap yang mengalami penurunan menjadi Rp 1,16 triliun dari Rp 1,45 triliun pada laporan keuangan perusahaan untuk periode Januari-September 2014. INVS juga mengakui laba bersih per saham berdasarkan laba periode berjalan. Praktik ini menjadikan laba bersih perusahaan terlihat lebih besar. Padahal, seharusnya perseroan menggunakan laba periode berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk. (<http://bareksa.com/id/text/2015/02/25/bei-laporan-keuangan-inovisi-salah-saji-suspen-saham-belum-dibuka/9562/analysis>).

Kasus manipulasi laporan keuangan juga terjadi pada perusahaan milik Bakrie Group. Berdasarkan laporan *Indonesia Corruption Watch (ICW)* penjualan 3 perusahaan tambang batu bara milik Bakrie Group diduga dengan merekayasa pelaporan oleh PT Bumi Resources Tbk., dan menyebabkan kerugian negara sebesar US\$ 620,49 juta. Firdaus Ilyas selaku Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaram *ICW* mengatakan dugaan rekayasa laporan penjualan terjadi pada PT Kaltim Prima Coal, PT Arutmin Indonesia dan induk kedua perusahaan tersebut yaitu PT Bumi Resources Tbk. Hasil analisa *ICW* terhadap laporan keuangan yang telah diaudit, menunjukkan laporan penjualan PT Bumi Resources selama 2003-2008 lebih rendah US\$ 1,06 miliar dari yang sebenarnya. Akibatnya, selama itu pula diperkirakan kerugian negara dari kekurangan penerimaan dana hasil produksi batubara (royalti) sebesar US\$ 143,9 juta.

(<http://www.bisnis.tempo.co/amp/225895/icw-ungkap-manipulasi-penjualan-batu-barab-grup-bakrie>).

Berdasarkan beberapa kasus yang telah diuraikan menunjukkan bahwa masih banyak terdapat praktik manajemen laba yang dilakukan beberapa perusahaan di Indonesia. Permasalahan manajemen laba sendiri telah menarik perhatian para praktisi, akademisi akuntansi dan keuangan dikarenakan manajemen laba seolah telah menjadi budaya yang diterapkan oleh perusahaan. Sebab dan akibat dari timbulnya aktivitas manajemen laba tidak hanya menghancurkan tatanan ekonomi, tetapi juga tatanan etika dan moral. Integritas dan kredibilitas para akuntan yang seharusnya menjadi pihak dalam mendeteksi manajemen laba menjadi di ragukan. Manajemen laba timbul sebagai dampak persoalan keagenan yaitu adanya ketidakselarasan kepentingan antara pemilik dan manajemen. Konflik kepentingan tersebut dapat diminimumkan melalui mekanisme monitoring yang bertujuan untuk menyelaraskan (alignment) berbagai kepentingan tersebut. Mekanisme monitoring yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keberadaan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komite audit.

Sebagai pengawas jalannya kegiatan perusahaan dewan komisaris independen dan komite audit dapat mengarahkan pihak manajemen untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas khususnya informasi mengenai laba. Oleh sebab itu peranan komisaris independen dan komite audit perusahaan dapat meminimalisir terjadinya manajemen laba. Penelitian Rezaei dan Roshani (2012) membuktikan bahwa proporsi anggota komisaris independen dapat mempengaruhi manajemen laba. Hasil yang sama juga dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan Mahmudah (2013) bahwa komisaris independen berpengaruh

positif signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan Almalita (2017) serta Nugraheni, dkk (2015) menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Penelitian yang dilakukan oleh Nabila dan Daljono (2013) menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Sedangkan penelitian Widiatmaja (2010) menunjukkan hasil bahwa komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba.

Besarnya kepemilikan saham oleh manajer akan memotivasi manajer untuk meningkatkan kinerjanya. Sedangkan kemampuan kepemilikan institusional sebagai pemegang saham oleh institusi keuangan dalam mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring, dapat mengurangi tindakan manajemen laba. Tindakan pengawasan perusahaan oleh pihak investor institusional dapat mendorong manajer lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan sehingga akan mengurangi perilaku mementingkan diri sendiri, laporan keuangan yang dihasilkan pihak manajemen juga akan lebih berintegritas. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Elijah (2012) bahwa hubungan antara kepemilikan manajerial dan manajemen laba berpengaruh signifikan. Sedangkan penelitian Agustia (2013) menemukan hasil yang berbeda bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Independensi auditor merupakan salah satu indikator lain yang dapat mendeteksi manajemen laba. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Welvin I Guna dan Herawaty (2010) independensi auditor menggunakan proksi lamanya penugasan audit yang digolongkan menjadi 1 tahun, 2 tahun dan 3 tahun.

Independensi auditor merupakan suatu hal yang penting karena pendapat yang diberikan oleh auditor berkaitan dengan kepentingan banyak pihak. Untuk itu auditor harus memiliki independensi yang sangat tinggi. Independensi mencerminkan sikap tidak memihak dan tidak di bawah tekanan pihak tertentu dalam pengambilan sebuah keputusan. Independensi auditor merupakan persoalan utama sebagai syarat pemenuhan kriteria objektivitas dan keterbukaan.

Profesi akuntan publik adalah profesi yang sangat penting. Namun, integritas dan objektivitas sebagai seorang auditor mulai diragukan oleh pihak yang memiliki kepentingan atas laporan audit akibat dari terjadinya beberapa skandal keuangan yang ada. Dalam hal ini, Kantor Akuntan Publik (KAP) perlu meningkatkan integritas auditor agar dapat memperoleh kembali kepercayaan oleh pengguna dengan meningkatkan independensi sebagai auditor.

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) seksi 220, dijelaskan bahwa independensi itu berarti tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum (dibedakan dalam hal berpraktik sebagai auditor intern). Dengan demikian, ia tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun, sebab bilamana tidak demikian halnya, bagaimanapun sempurnanya keahlian teknis yang ia miliki, ia akan kehilangan sikap tidak memihak yang justru paling penting untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya.

Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik, pada pasal 2 ayat (1) diatur tentang jasa audit umum atas laporan

keuangan dan pada pasal 3 ayat (1) diatur bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) paling lama untuk enam tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama tiga tahun buku berturut-turut. Auditor dalam menjalankan profesinya dituntut untuk bersikap independen dalam menemukan kemungkinan perilaku penyimpangan atau kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Hal ini sebagaimana Keputusan Menteri Keuangan No. 423.KMK-06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik yang mengatur mengenai rotasi wajib bagi auditor dan Kantor Akuntan Publik dengan tidak diperbolehkan memberikan jasa nonaudit di samping jasa audit itu sendiri, karena dapat mengganggu independensi auditor. Independensi auditor juga akan memberi dampak pada pendekatan manajemen laba. Dimana Independensi seorang auditor menjadi salah satu faktor yang dapat mengurangi terjadinya manajemen laba.

Adanya *research gap* atau *inconsistency* dalam penelitian terdahulu mengenai pengaruh komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komite audit yang merupakan proksi dari *good corporate governance* terhadap manajemen laba mendorong peneliti untuk melakukan penelitian ulang. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Achmad Riyadi (2017) dengan judul “Mekanisme *Good Corporate Governance* Terhadap Praktik Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2015”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penambahan variabel independen yaitu independensi auditor,

dan pembaharuan tahun penelitian. Independensi auditor digunakan untuk mencegah terjadinya manajemen laba yang dinilai dari lamanya penugasan auditor diperusahaan yang sama.

Berdasarkan uraian di atas, maka judul penelitian ini adalah “**Pengaruh Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Komite Audit dan Independensi Auditor Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Adanya praktik manajemen laba yang telah menjadi budaya dalam perusahaan.
2. Terdapat kebijakan yang diperbolehkan oleh standar akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk memodifikasi laba yang dilaporkan.
3. Ketidaksesuaian kepentingan antara pemilik dan manajemen berdampak atas terjadinya manajemen laba.
4. Manajemen melakukan tindakan manajemen laba agar laporan keuangan perusahaan terlihat baik.
5. Perlunya mekanisme monitoring untuk menekan terjadinya manajemen laba dalam perusahaan.

6. Independensi auditor menjadi indikator dalam mendekripsi tindakan manajemen laba di dalam perusahaan.

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan mencegah luasnya permasalahan, maka penulis membatasi pokok permasalahan yaitu tentang “Pengaruh Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Komite Audit Dan Independensi Auditor Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017”.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah komisaris independen secara parsial berpengaruh terhadap manajemen laba?
2. Apakah kepemilikan institusional secara parsial berpengaruh terhadap manajemen laba?
3. Apakah kepemilikan manajerial secara parsial berpengaruh terhadap manajemen laba?
4. Apakah komite audit secara parsial berpengaruh terhadap manajemen laba?
5. Apakah independensi auditor secara parsial berpengaruh terhadap manajemen laba?

6. Apakah komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit dan independensi auditor secara simultan berpengaruh terhadap manajemen laba?

1.5 Tujuan Penelitian

Dari masalah-masalah yang ada pada uraian tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap manajemen laba.
2. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen laba.
3. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba.
4. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap manajemen laba.
5. Untuk mengetahui pengaruh independensi auditor terhadap manajemen laba.
6. Untuk mengetahui pengaruh komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit dan independensi auditor terhadap manajemen laba.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk :

1. Peneliti

Sebagai sarana menambah pengetahuan mengenai pengaruh komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit dan independensi auditor terhadap manajemen laba.

2. Institusi

Menambah literatur, pengembangan ilmu akuntansi dan acuan penelitian pada bidang akuntansi, terutama untuk peneliti yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai manajemen laba.

3. Objek Penelitian

Menyadarkan perusahaan bahwa pentingnya keberadaan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komite audit dalam sebuah perusahaan untuk mencegah terjadinya manajemen laba. Dan bagi praktisi auditor untuk menjaga independensinya sebagai seorang auditor.